

**AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA ORGANISASI
NIRLABA
(STUDI PADA GBI AMBARAWA)**

Arditha Pramesti¹, Ester Candra Riyandini, David Adechandra Aschedica Pesudo
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

This study aims to analyze financial accountability practices and internal controls conducted in Church organizations. Accountability practices are divided into 3, namely income, expenditure, and assets and internal control over these three issues. The type of this research is qualitative research. This study uses primary data types through interviews, and secondary data through financial statements. The results of this study indicate that the practice of financial accountability in GBI Organizations. Cipto 3 Ambarawa is sufficient and internal control is relatively loose but does not cause fraud.

Keywords: *accountability, financial accountability, internal control, GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawaban seseorang dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara periodik. Sehingga ketika seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya dalam suatu organisasi, maka harus mengesampingkan kepentingan pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari teori *stewardship* yang merupakan gambaran situasi dimana para *steward* tidak mempunyai kepentingan pribadi, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal*. Akuntabilitas menjadi kunci penting keberhasilan suatu organisasi untuk bisa bertahan. Dimana akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada pemberi dana, yang menjelaskan bahwa dana yang diterima telah digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam sebuah organisasi baik itu organisasi pencari laba maupun organisasi nirlaba diperlukan adanya akuntabilitas, karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan pihak eksternal (Randa, 2011). Akan tetapi, akuntabilitas pada kedua organisasi tersebut berbeda. Hal ini dikarenakan, organisasi nirlaba memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini menimbulkan model tata kelola keuangan yang berbeda.

Pada organisasi nirlaba akuntabilitas keuangan akan bersandar pada sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik organisasi nirlaba (Kurniawan, 2014).

Kunci utama untuk pengembangan sebuah sistem pengendalian internal adalah penaksiran resiko dan penentuan aktivitas pengendalian. Selain itu akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba juga ditentukan oleh beberapa faktor pendukung diantaranya sumber daya manusia yang handal, infrastruktur, dan perangkat pengelolaan keuangan yang sesuai.

Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, organisasi jasa sukarelawan, sekolah negeri, dan rumah sakit. Persepsi mengenai organisasi keagamaan yang tidak butuh pengelolaan yang baik (*good governance*) mengakibatkan praktek akuntabilitas tidak terbentuk, sehingga umumnya praktek keuangan dan pengelolaan organisasi keagamaan didasari pada kepercayaan tanpa adanya sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat (Simanjuntak & Januarsih, 2011). Untuk itu perlu adanya akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat (donatur) sebagai *feedback* atas pendapatan yang telah diterima oleh organisasi.

Seperti halnya organisasi yang lain, organisasi keagamaan juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satu hal yang tidak dapat dihindari selama proses berlangsungnya kegiatan keagamaan adalah permasalahan keuangan maupun kinerja. Salah satu contoh permasalahan bisa tercermin dari akuntabilitas yang dilakukan antara pihak pengelola dana atau pengurus dengan pihak pemberi dana tempat ibadah. Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan tempat ibadah mendapatkan dana dari berbagai pihak, seperti pemerintah, jemaat dan pihak lainnya. Ketika sebuah tempat ibadah mendapatkan dana serta mengelolanya maka akan muncul kebutuhan akan akuntabilitas oleh pemangku kepentingan pada tempat ibadah tersebut, dimana pengelola tempat ibadah harus mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan, serta menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang berlangsung menggunakan dana dari pihak pemberi dana sesuai dengan tujuan tempat ibadah tersebut (Rachmanto, 2016).

Gereja merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba keagamaan. Sehingga gereja memerlukan informasi akuntansi untuk mempertanggungjawabkan sumbangan yang telah diterima dari berbagai pihak. PSAK No. 45 menyatakan bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan pihak lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Tujuan dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi bagi pihak internal adalah untuk mengetahui situasi keuangan di organisasi, dan untuk pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang telah disumbangkan digunakan dengan baik sebagaimana mestinya (Cintokowati, 2010). Gereja akan melaporkan laporan keuangannya kepada jemaat yang merupakan sumber pendapatan gereja, bahkan donatur dari luar gereja. Hal ini menyebabkan jemaat dan para donatur lebih termotivasi untuk lebih lagi dalam memberikan persembahan syukur serta untuk memberikan bantuan dana yang

berguna dalam menopang pelayanan gereja. Gereja memerlukan manajemen keuangan yang baik untuk mengupayakan perolehan dana dan mengatur penggunaan dana.

Penerapan akuntansi dalam gereja harus dapat memberikan informasi yang akurat, peranan akuntansi tersebut nantinya akan berguna bagi manajemen (pimpinan) gereja dalam fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengelolaan keuangan gereja yang baik perlu memperhatikan bagaimana gereja mengelola keuangannya dan mengupayakan informasi keuangan gereja.

Gereja selaku organisasi harus mengelola keuangan secara profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Bukan hanya sekedar pelayanan di mimbar namun harus menyangkut seluruh aspek yang mendukung tugas gereja sebagai organisasi termasuk didalamnya keuangan. Kaomaneng (2012) menunjukkan bahwa di dalam pengelolaan keuangan gereja juga dapat timbul masalah. Permasalahan yang kerap terjadi di gereja yaitu amplop ucapan syukur jemaat yang diberikan tidak dilaporkan oleh majelis, sumbangan dari donatur yang tidak diberikan kepada bendahara, pengambilan uang persembahan jemaat untuk kepentingan pribadi, tidak adanya laporan keuangan saat terjadi serah terima jabatan dari bendahara lama ke bendahara yang baru. Permasalahan yang lain terjadi pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Dr. Cipto 3 Ambarawa yang mana pada tahun 2001 GBI Dr. Cipto terjadi permasalahan intern tentang pengajaran yang dilakukan oleh Gembala sidang sehingga Gembala Sidang diberhentikan. Pada tahun 2004 GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa memiliki Gembala Sidang baru yang telah diteguhkan oleh sinode. Ketika masa peralihan tersebut terjadi penggelapan sumbangan dana yang dilakukan oleh salah satu pekerja gereja pada Bendahara acara bidang kategorial akibat tidak adanya pemisahan tugas antara pihak yang mencatat dan menerima uang.

Berbagai permasalahan tersebut kerap kali terjadi lantaran keuangan gereja yang dianggap sebagai dana sosial sehingga dalam penggunaannya tidak diperhatikan, dan menimbulkan praktek korupsi. Kurangnya perhatian dalam penggunaan keuangan gereja diakibatkan adanya manajemen keuangan yang kurang baik dari pihak gereja sebagai pimpinan jemaat ataupun pemegang keuangan atau bendahara, serta kurangnya pendalaman teologis tentang dosa korupsi.

Alasan lain yang kerap terjadi karena gereja dianggap lembaga sosial sehingga permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ada pula pihak yang berpendapat bahwa masalah keuangan merupakan hal yang sensitif karena itu harus berhati-hati dalam menangani kasus keuangan karena akan merusak keutuhan dan kewibawaan gereja (Kristina, 2010). Selain itu gereja memperoleh pendapatan dari berbagai sumber diantaranya dari persembahan umat, donatur, aksi sosial natal, dan aksi sosial paskah. Oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas yang diterapkan di gereja guna

mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima tersebut kepada para pemberi dana. Apabila pengendalian internal pada sebuah organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, begitu juga sebaliknya ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun *fraud* dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi (Arfah, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana akuntabilitas keuangan yang ada di GBI Ambarawa?; dan 2) Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan di GBI Ambarawa?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengamati dan mendeskripsikan akuntabilitas yang terdapat pada GBI Ambarawa serta menganalisis pengendalian internal yang diterapkan di GBI Ambarawa.

TELAAH LITERATUR

Teori *Stewardship*

Menurut Usumah (2010) teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia pada dasarnya dapat bertanggungjawab, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan dapat berlaku jujur kepada pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang bahwa manajemen dapat bertindak dengan baik bagi kepentingan publik maupun bagi *stakeholder*. Pada organisasi nirlaba seperti gereja bendahara (*steward*) bertugas untuk mengelola sumber daya dan jemaat (*principal*) selaku pemilik sumber daya. Sehingga, bendahara selaku *steward* harus berintegritas serta jujur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan *stakeholder* dan untuk mencapai tujuan organisasi.

Akuntabilitas Organisasi Nirlaba

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban individu maupun kelompok organisasi kepada para *stakeholder* (jemaat gereja, dan majelis gereja) (Ginting, 2014). Dalam organisasi nirlaba akuntabilitas diperlukan karena sama seperti organisasi pencari laba, organisasi nirlaba juga mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Secara filosofi, akuntabilitas lebih ditekankan pada "*Value*" yang tertera pada laporan keuangan, akan tetapi pada organisasi nirlaba akuntabilitas tidak hanya sebatas "*Value*" saja secara spiritual yang diwujudkan melalui keikhlasan dan rasa syukur dalam memberikan sesuatu (Silvia & Ansar, 2011). Selain itu, pengurus organisasi nirlaba dituntut

untuk memperlihatkan kejujuran dan kesungguhan dalam mengelola sumber daya terutama keuangan, penjagaan dan pemeliharaan harta, manajemen SDM, pelaksanaan program, dan perencanaan masa depan organisasi.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa organisasi nirlaba harus memiliki akuntabilitas sehingga dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak eksternal (Ginting, 2014). Menurut Nuraini (2017) akuntabilitas juga menjadi bagian paling penting dalam menjalankan sebuah organisasi, dimana akuntabilitas dapat menjadi tolak ukur kepercayaan publik. Sehingga akuntabilitas tidak hanya penting bagi organisasi pencari laba, tetapi juga penting bagi organisasi nirlaba baik itu organisasi lembaga pemerintahan maupun organisasi publik non pemerintahan.

Pengendalian Internal Organisasi Nirlaba

Pengendalian internal erat kaitanya dengan akuntabilitas sebuah organisasi. Hasil penelitian Tiasari (2013) mengatakan bahwa pengendalian internal dan akuntabilitas saling terkait, hal ini ditandai dengan beberapa hal yaitu 1) lingkungan pengendalian mencakup seluruh komponen yang ada di dalam organisasi yang saling mendukung supaya tercipta lingkungan yang positif dan kondusif; 2) dengan adanya penilaian resiko yang tepat, dapat mengurangi hambatan yang mengancam organisasi sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas suatu organisasi; 3) akuntabilitas dapat meningkat ketika kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan dalam mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan; 4) akuntabilitas juga dapat meningkat ketika kegiatan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala dan didukung dengan pola informasi komunikasi yang aktif, kondusif, dan berkesinambungan; dan 5) pemantauan yang dilakukan secara berkala juga dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas.

Akan tetapi pengendalian internal pada organisasi tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja, tetapi meliputi berbagai aspek kegiatan organisasi. Definisi pengendalian internal sebagai sebuah kebijakan dan prosedur yang dapat digunakan untuk melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat, meningkatkan efisiensi usaha serta memastikan bahwa peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik (Arfah, 2011).

Gereja

Organisasi gereja merupakan salah satu organisasi nirlaba pada bidang keagamaan. Secara organisasi gereja didefinisikan sebagai sebuah badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata ibadahnya (Kabuhung, 2013). Menurut Racmanto

(2016) untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antara jemaat satu dengan yang lain, biasanya gereja menyelenggarakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan jemaat gereja. Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan misalnya perayaan paskah, perayaan natal, perayaan ulang tahun gereja, dan pelaksanaan sekolah minggu gereja. Dalam melakukan aktivitas gereja tentunya memerlukan biaya, pembiayaan operasional gereja dapat dilakukan ketika gereja memiliki pendapatan yang cukup. Pendapatan gereja diperoleh dari berbagai sumber seperti persembahan umat, donatur, aksi sosial natal dan aksi sosial paskah. Dalam organisasi nirlaba keagamaan seperti gereja akuntabilitas juga termasuk dalam pelayanan yang meliputi pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian (Silvia & Ansar, 2011). Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan dari pengelola kepada jemaat (pemberi dana) sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas dana yang telah diterima.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, berupa data-data non angka yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber dan observasi. Untuk data sekundernya berupa laporan keuangan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan meliputi wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada Bapak Pdt. Paulus Raditya Praba selaku Gembala Sidang GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa yang selanjutnya akan disebut sebagai Responden Satu, Bapak Yusak Hartono selaku Bendahara Umum GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa yang selanjutnya akan disebut sebagai Responden Dua, dan Bapak Joko Sulistyono selaku penatua bagian koordinator ibadah yang selanjutnya disebut sebagai Responden Tiga. Dan observasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan pengendalian internal di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, merupakan sebuah metode yang sifatnya menguraikan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Organisasi Gereja

Gereja Bethel Indonesia (GBI) beralamat di Jl. Dr. Cipto 3 Ambarawa. Gereja ini didirikan pada tahun 1970 dengan luas tanah $\pm 420 \text{ m}^2$ serta luas bangunan $\pm 390 \text{ m}^2$. Pada mulanya gereja ini berfokus untuk mengembangkan pelayanan di bidang wanita, anak dan juga mengadakan POS PI di daerah Bandungan, Kupang Dukuh Ambarawa, Tambakboyo, Bawen dan Gempol Pojoksari dan oleh karena kasih karunia Tuhan POS PI Bandungan, Tambakboyo dan Bawen kemudian bertumbuh menjadi Gereja Cabang. Tahun 1982 GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa memiliki gedung permanen yang cukup luas untuk menampung jemaat yang semakin bertambah jumlahnya.

Tahun 1987 Gembala Sidang Pdt. David Sumendap meninggal dunia dan digantikan oleh Ibu Gembala Ibu Pdt. Hermien Sumendap. Pada tahun 1993 Pdt. Yakub Sulisty menjadi wakil dari Ibu Gembala yang kesehatannya mulai menurun, Bapak Pdt. Yakub Sulisty sendiri menjadi gembala pada tahun 1998 setelah Ibu Gembala meninggal dunia.

Pada tahun 2001 GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa mengalami permasalahan intern tentang pengajaran dari Gembala Sidang yang tidak sejalan dengan pengajaran dari GBI, sehingga Gembala Sidang diberhentikan. Kejadian tersebut menyebabkan penurunan jumlah jemaat. Tahun 2004 Pdt. Paulus Raditya Praba diteguhkan oleh Sinode untuk menjadi Gembala Sidang GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa. Hal pertama yang dilakukan oleh Pdt. Paulus Raditya Praba adalah meluruskan pengajaran yang salah yang sejalan dengan sinode GBI. Selain itu Bapak Gembala juga membangun kembali kepercayaan jemaat kepada pengurus termasuk didalamnya terhadap Gembala Sidang melalui visitasi dan rekonsiliasi ke jemaat. Sampai saat ini jumlah jemaat di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa semakin meningkat, dan memiliki 2 pos PI tambahan di Desam Toyogiri Tuntang dan Dsn. Gentungan Tuntang.

Untuk melayani jemaat gereja membentuk beberapa bidang pelayanan yang memiliki program kerja selama satu tahun. Menjelang akhir tahun akan dilakukan evaluasi dan penyusunan program kerja yang baru untuk tahun yang akan datang. Setiap bidang memiliki pengurus masing-masing sehingga program kerja yang disusun dan dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran. Bidang pelayanan kategorial di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa terdiri dari: Bidang Anak (ABI), Bidang Pemuda dan Remaja (Heavy) yang keduanya berada diibawah naungan Komisi Pemuda dan Anak. Selain itu terdapat Bidang Wanita (WBI), Bidang PI & Misi, Bidang Sosial, Bidang Ibadah, serta Bidang Interior dan Pemeliharaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Gembala Sidang, Responden Satu dibantu oleh Para Penatua, Sekretaris, Bendahara, *Fulltimer*, dan para pelayan Tuhan.

GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri memiliki berbagai rangkaian ibadah setiap minggunya seperti Ibadah Raya 1 dan Ibadah Raya 2, Ibadah Anak, Ibadah Pemuda Remaja, Ibadah Wanita, Ibadah KTB atau yang biasa disebut Komunitas Sel, dan Ibadah Perayaan Hari Raya. Selain bidang kategorial di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa memiliki beberapa POS PI, Panti Asuhan, dan 2 (dua) tahun terakhir mengelola PPA Sumber Kasih.

Praktik Akuntabilitas Keuangan Gereja

Pemasukan

Pada buku Tata Gereja GBI (2014) menjelaskan terkait Sumber Keuangan baik BPH, BPD, maupun Jemaat Lokal

“Keuangan BPH sebagai pengurus sinode diperoleh dari: (1) Persepuluhan dari seluruh pemasukan jemaat lokal; (2) Persembahan sukarela dari pada simpatisan dan pejabat Gereja Bethel Indonesia; (3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan.”

Tanggung jawab Bendahara tidak hanya sekedar menerima, mencatat dan menyimpan uang yang didapat namun lebih dari itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang Bendahara Gereja.

Responden Satu selaku Gembala Sidang GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa menjelaskan bahwa:

“Untuk menjadi seorang Bendahara Gereja tidak perlu lulusan dari Ekonomi, ketika seorang yang sudah dipilih menjadi bendahara tidak bisa menggunakan komputer bisa meminta bantuan kepada anaknya atau kepada Sekretaris Gereja, yang penting ketika terdapat kas masuk dan kas keluar dicatat dengan baik, rapi dan teliti. Ketika akan menetapkan seorang Bendahara Gereja harus memperhatikan background dan riwayat keluarga yang baik, jujur, transparan, berintegritas dan memiliki hati untuk melayani.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi Bendahara Gereja tidak dibutuhkan lulusan khusus yang mempelajari terkait dengan keuangan seperti lulusan Ekonomi. Namun yang lebih penting dari itu adalah orang yang jujur dan memiliki hati untuk melayani. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa bendahara selaku *steward* harus berintegritas serta jujur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan *stakeholder* untuk mencapai tujuan organisasi (Usumah, 2010). Karena keuangan Gereja adalah bentuk pertanggungjawaban dengan Tuhan dan dengan jemaat. Hidup seorang Bendahara Gereja harus dapat menjadi teladan bagi jemaat, rajin beribadah dan memiliki hidup baru dalam kasih Yesus.

Gereja GBI secara umumnya menganut sistem Episkopal Sinodal yang berarti bahwa yang berkuasa dalam Gereja adalah Gembala Sidang, termasuk didalamnya mengelola keuangan. Namun Responden Satu sebagai Gembala Sidang GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa tidak melakukan hal ini. Beliau menjelaskan bahwa:

“Aliran yang terkenal di gereja adalah aliran Karismatik dan aliran Injili. Gereja Bethel Indonesia sendiri menganut aliran Karismatik. Prinsipnya adalah pada cara peribadatannya. Gereja Injili lebih memiliki aturan termasuk cara peribadatan, liturgi yang tetap, dan lagu-lagu kidung yang dinyanyikan. Namun gereja Karismatik adalah aliran gereja yang tidak mengutamakan liturgi namun cara ibadah yang bebas dan menyanyikan tidak hanya lagu-lagu lama namun juga lagu-lagu baru. Perbedaan kedua ada pada sistemnya. Gereja Bethel Indonesia yang termasuk dalam Gereja Karismatik keuangannya dikelola oleh Gembala Sidang masing-masing, sedangkan Gereja Injili keuangannya diatur oleh Majelis Gereja”

Responden Satu sendiri sejak awal beliau menjabat sebagai Gembala Sidang di GBO Dr. Cipto 3 Ambarawa beliau menetapkan keuangan gereja tidak dipegang dan diatur oleh Gembala Sidang namun diatur dan dikelola oleh Bendahara termasuk persembahan perpuluhan. Sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan aturan GBI pada umumnya yang menyatakan persembahan dipegang oleh Bendahara namun perpuluhan yang memegang Gembala Sidang. Hal ini dikarenakan untuk memberikan kepercayaan kepada Pengurus GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa bahwa Responden Satu betul-betul ingin melayani dan tidak memiliki tendensi apapun untuk mencari keuntungan pribadi seperti yang dilakukan Gembala Sidang sebelumnya. Peraturan kedua yang dibuat oleh Responden Satu adalah semua aset tidak boleh mengatasnamakan pribadi, harus atas nama Yayasan. Oleh sebab itu Gereja mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Sumber Kasih.

GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa hanya memiliki satu Bendahara Umum sehingga dalam pengelolaan keuangan tidak ada pemisahan fungsi mengenai pencatatan dan penyimpanan keuangan. Seharusnya antara bagian keuangan dan bagian akuntansi terpisah sehingga akan lebih terarah pengelolaannya. Selain itu juga untuk menghindari adanya penyalahgunaan keuangan Gereja oleh Bendahara. Responden Satu juga menuturkan bahwa Bendahara Umum Gereja tidak sejak Responden Satu menjabat tahun 2003 hingga sekarang tidak pernah terdengar kabar penyalahgunaan keuangan gereja bahkan bendahara sendiri justru tidak sungkan memakai keuangan pribadinya ketika kas gereja menipis karena bendahara yang dipilih ini memiliki latar belakang keuangan yang tidak kekurangan. Ketika Beliau ditanya apakah ada peluang menambah personil untuk bagian keuangan sebagai Bendahara gereja Beliau masih harus selektif dalam memilih karena terkait dengan pengelolaan keuangan Gereja dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Responden Satu. GBI secara umum tidak memiliki SOP dalam hal pengelolaan keuangan, jadi pengelolaan keuangan dibuat tergantung oleh kebijakan Gereja Lokal masing-masing. Pencatatan keuangan yang diberlakukan selama ini adalah uraian pemasukan dan pengeluaran secara jelas.

Persembahan di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri dibedakan menjadi persembahan umum dan persembahan kategorial. Untuk persembahan umum semua diserahkan kepada

Bendahara Umum, hanya saja untuk donasi yang diberikan kepada Panti Asuhan Sumber Kasih langsung diserahkan kepada pengurus Panti Asuhan Sumber Kasih untuk mengelola keuangan tersebut. Sedangkan persembahan bidang kategorial langsung dikelola oleh bidang sendiri dan digunakan untuk kegiatan yang telah diprogramkan oleh masing-masing bidang. Dalam hal ini, bendahara masing-masing bidang kategorial akan mengelola keuangannya sendiri tanpa ada intervensi dari Bendahara Umum maupun Gembala Sidang. Namun ketika setiap bidang mengalami kekurangan dalam hal keuangan dapat meminta kas dari umum.

Bendahara umum gereja melakukan pencatatan atas setiap kas masuk dan kas keluar secara manual dengan dilampirkan nota yang ada. Responden Dua selaku Bendahara Umum menjelaskan sebagai berikut:

“Saya melakukan pencatatan hanya debit dan kredit saja dan saya melakukannya secara manual. Selama ini saya hanya membuat laporan mengenai jumlah persembahan perpuluhan yang nantinya akan ditempel di papan pengumuman. Laporan keuangan kas masuk dan kas keluar hanya dilakukan saat akhir tahun. Namun apabila Gembala Sidang bertanya laporan keuangan sewaktu-waktu saya dapat menunjukkan buku catatan dan rekening koran pada tabungan.”

Hampir semua bidang kategorial pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual karena selama ini bendahara tidak pernah memperoleh pelatihan khusus dalam pengelolaan keuangan. Pada prinsipnya laporan keuangan disajikan untuk mengukur kinerja organisasi secara finansial. GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri sudah membuat laporan keuangan mengenai perpuluhan dan persembahan khusus dari jemaat rutin tiap bulan. Hal yang rutin dibuat adalah laporan untuk perpuluhan setiap bulan karena untuk persembahan khusus belum tentu setiap bulan ada yang memberi. Bendahara beserta Gembala Sidang dan para pengurus gereja sendiri tidak membuat laporan keuangan mengenai kolekte yang didapan setiap minggu dan setiap bulannya untuk dibagikan di papan pengumuman. Berikut merupakan penuturan Bapak Gembala:

“Laporan yang disajikan rutin kepada jemaat adalah laporan mengenai perpuluhan jemaat, dan dana atau sumbangan yang masuk untuk panti. Untuk laporan keuangan kolekte tidak kami sajikan kepada jemaat dengan alasan karena untuk meminimalisir resiko apabila jemaat akan meminjam uang gereja karena uang yang terdapat di gereja relatif besar. Apabila uang gereja digunakan untuk meminjamkan kepada jemaat satu, namun tidak meminjamkan kepada jemaat yang lain sekalipun pengurus memiliki alasan akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi gereja mengingat gereja adalah organisasi agama. Bukan organisasi secara umum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Semua yang didapatkan dari jemaat akan dipergunakan untuk kebutuhan gereja, perawatan gedung gereja dan untuk perlengkapan lainnya yang nantinya ketika digunakan untuk pembelian dalam jumlah yang besar akan disampaikan kepada jemaat melalui pengumuman yang disampaikan saat ibadah.”

Pengeluaran

Dalam buku Tata Gereja GBI (2014) menjelaskan terkait Penggunaan Keuangan pada Pasal 96 yaitu:

- (1) *Keuangan BPH digunakan untuk: (a) Membiayai pelaksanaan Program Nasional GBI yang disahkan oleh Sinode; (b) Membiayai pelaksanaan program yang disetujui oleh MPL; (c) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPH. (2) Keuangan BPD digunakan untuk: (a) Membiayai program daerah yang telah disahkan sidang Majelis Daerah; (b) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPD. (3) Keuangan Jemaat Lokal digunakan untuk: (a) Membiayai pelaksanaan program jemaat lokal sesuai dengan visi Gembala Jemaat; (b) Membiayai kehidupan Gembala Jemaat dan Staf.*

GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa pernah mengalami defisit, Responden Dua selaku Bendahara Umum digereja menjelaskan hal berikut:

“Gereja kita pernah mengalami defisit ketika masa penggembalaan Gembala Sidang sebelumnya. Saya tidak menyebutkan berapa totalnya. Akhir-akhir ini gereja juga sempat mengalami defisit kisaran angka Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000 dikarenakan membeli rumah sebelah gereja yang akan dijadikan tempat untuk PPA dan pembangunan Panti Asuhan. Gereja juga pernah menanggung kerugian dari penipuan agen perjalanan yang sedianya akan dilaksanakan perjalanan wisata oleh jemaat sekitar Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000. Namun tidak selalu merugi, penerimaan kas setiap tahunnya di Gereja cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan kerugian bukan berasal dari operasional gereja namun kondisi diluar kendali. Untuk menutupi kerugian yang dialami gereja, harus lebih pintar lagi dalam pengelolaan dan perputaran uang digereja.”

Berbeda dari penuturan Responden Dua, Responden Satu menjelaskan bahwa sebelumnya memang pernah mengalami kerugian. Namun saat Pdt. Paulus Raditya Praba menggembalakan kerugian akibat pembelian rumah dan menanggung penipuan dari agen perjalanan tersebut tidak segan Bendahara Umum menggunakan uangnya pribadi untuk menutupi segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu Responden Satu menekankan pentingnya hati yang rela melayani tanpa pamrih dalam melakukan pekerjaan Tuhan pada organisasi gereja yang tidak mencari keuntungan. Namun tidak jarang bahwa keuangan GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa mengalami surplus seperti yang terjadi pada Kepanitiaan Natal 2017 dan Paskah 2018 yang menghasilkan surplus ± Rp. 10.000.000 yang kemudian diserahkan Bendahara Umum untuk diberikan kepada Kas. Begitupun bidang kategorial yang lain yang juga tidak jarang mengalami surplus pada setiap kegiatannya.

Responden Satu merasa bersyukur dikarenakan setiap bidang kategorial, Panti Asuhan, maupun PPA berjalan dengan mandiri. Dalam artian setiap bidang tersebut tidak pernah meminta dana dari Kas Umum. Setiap bidang kategorial sudah dapat melaksanakan operasional masing-masing. Responden Satu menjelaskan sebagai berikut:

“Oleh Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja setiap bidang yang terdapat digereja sudah melaksanakan program dan operasional masing-masing. Baik Panti Asuhan, PPA, Bidang Anak, Bidang Remaja, Bidang Wanita dapat

melaksanakan kegiatan mereka masing-masing tanpa harus meminta Kas Umum. Sebenarnya Bendahara tidak menutup diri untuk memberikan dana kepada setiap bidang. Sistemnya adalah ketika ada kekurangan dan Bidang sudah tidak bisa mengupayakan barulah mereka meminta dana dari Kas Umum dan Bendahara Umum akan mencatatnya sebagai pengeluaran terhadap bidang. Namun selama ini tidak pernah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan melingkupi dan melimpah bagi setiap anakNya yang berserah dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa melihat sendiri contohnya adalah Panti Asuhan, setiap pengurus panti setiap bulan mengadakan iuran untuk operasional Panti Asuhan Sumber Kasih, untuk SPP kepada \pm 20 anak yang bersekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hitungan kasar setiap bulan Panti Asuhan membutuhkan dana \pm Rp. 11.000.000 sedangkan iuran pengurus yang berjumlah 5 orang ketika dijumlahkan hanya sekitar Rp.6.000.000 – Rp. 7.000.000. Ketika otak manusia secara normal berpikir bahwa tidak mungkin bisa mencukupi namun Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Ketika pembangunan Panti Asuhan, sebelumnya anak-anak harus berpindah dari satu rumah kerumah yang lain karena masa kontrak sudah berakhir, kami memberanikan diri untuk membangun Panti. Apakah saat itu ada uang? Tidak ada. Namun kami percaya berkat Tuhan selalu ada bagi anakNya yang mempunyai visi dan tujuan yang tidak bertentangan dengan kehendak firman Tuhan.

Begitupun bidang yang lain, mereka mendapat dana hanya dari persembahan mereka setiap minggu. Namun siapa sangka bahwa hasil persembahan Anak setiap minggu dapat digunakan untuk membuat perayaan natal yang meriah yang selalu berkesan bagi anak. Semua tidak terlepas daripada peran Guru Sekolah Minggu. Namun yang terpenting adalah ketika kita memiliki niat yang baik, setiap usaha dan jerih payah kita tidak sia-sia dan Tuhan yang mencukupkan.”

Pada tahun pertama ketika PPA Sumber Kasih berpindah ke GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa Bendahara Gereja dan Bapak Gembala menjelaskan bahwa Gereja pada mulanya membiayai operasional secara keseluruhan dari PPA termasuk gaji para *staff* dan mentor yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Namun setelah berjalan setelah PPA pun sudah mendapat dana dari Pusat PPA pun gereja tetap memberi tambahan lebih untuk menambah gaji kesejahteraan para mentor dan pegawai PPA. Seperti yang terdapat dalam Ayub 11:24 menjelaskan bahwa ketika kita memberi kita tidak akan kekurangan.

Terkait dengan total persembahan dan perpuluhan GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri 10%nya disetorkan untuk BPH (Badan Pekerja Harian) yang dilaksanakan oleh Pusat. Kemudian 30%nya diberikan kepada BPD (Badan Pekerja Daerah) untuk melaksanakan kegiatan didaerah. Seperti yang dijelaskan pada Tata Tertib GBI Pasal 86 menjelaskan apabila secara khusus Gembala Jemaar Gereja tidak mengirimkan perpuluhan kepada BPH maka akan dikenakan disiplin Gereja. Responden Dua sendiri menjelaskan bahwa persembahan yang didapat setiap minggunya digunakan untuk pemeliharaan gereja dan operasional gereja (listrik, air, telepon). Lalu untuk perpuluhan digunakan tali kasih pekerja gereja, persembahan kasih bagi Pendeta tamu, dan kesejahteraan gembala yang sesudah dipotong untuk setoran kepada BPH dan BPD.

Aset

Berdasarkan pada buku Tata Gereja GBI (2014) bagian Tata Dasar Pasal 12 menjelaskan terkait Perbendaharaan Gereja yaitu:

“Perbendaharaan Gereja adalah barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak serta keuangan yang menjadi milik Gereja terdiri dari: (1) Milik Umum Gereja Bethel; Indonesia yaitu keuangan, semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh BPH/BPD atau dihibahkan dengan sah kepada BPH/BPD; (2) Milik jemaat lokal yaitu keuangan, semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat lokal atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat lokal; (3) Pengelolaan milik umum dilakukan oleh BPH/BPD sedangkan milik jemaat lokal oleh Gembala Jemaat.”

GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri memiliki penatua yang mengurus mengenai Perbendaharaan aset digereja. Seperti yang dijelaskan pada Tata Gereja GBI (2014) aset yang terdapat di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa memperoleh aset dari pembelian dan ada beberapa aset hasil dari pemberian seseorang. Responden Tiga selaku penatua bagian perbendaharaan aset gereja menuturkan bahwa untuk pembelian aset yang nantinya akan dibuat untuk peralatan gereja beliau akan *survey* terlebih dahulu harga-harga dimasing-masing toko untuk kemudian ketika sudah pasti barulah beliau akan memberitahukan ke Bendahara Umum terkait anggaran yang diperlukan. Untuk pelaporan dalam pembelian aset sendiri beliau menuturkan bahwa beliau yang bertanggungjawab dalam aset gereja tidak membuat laporan khusus terkait pembelian aset untuk gereja. Beliau hanya memberikan nota pembelian tersebut kepada Bendahara. Aset gereja merupakan bagian terpenting yang harus dijaga. Beliau menuturkan bahwa yang terpenting adalah pemeliharaan aset. Semahal apapun aset yang dibeli apabila tidak bisa merawat hal tersebut akan memperpendek umur aset. Kerusakan aset yang terjadi di gereja berdasarkan penuturan beliau adalah sebagai berikut:

*“Aset dari gereja kita sendiri terkadang sering rusak karena memang umur ekonomisnya telah habis, namun juga pernah kerusakan aset dikarenakan human error. Namun ketika kerusakan yang terjadi hanya dalam skala kecil saya dan beberapa teman di gereja biasa memperbaikinya sendiri. Hanya dikala terdapat kerusakan yang perlu diservis maka saya mengajukannya kepada Bendahara dan kepada Bapak Gembala untuk dilakukan servis pada alat yang rusak. Servis sendiri kita juga harus mempertimbangkan *cost and benefit* nya. Ketika biaya yang dikeluarkan tidak sepadan daripada manfaat yang diterima maka lebih baik tidak melakukan servis.”*

Aset-aset yang terdapat di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa secara keseluruhan merupakan aset yang dibeli langsung oleh Gereja. Namun beberapa adalah pemberian dari seseorang beliau mengatakan bahwa:

“AC di gereja ada 5 dan itu adalah pemberian dari seseorang. Lalu ketika kami membeli alat musik di salah satu jemaat digereja kami mendapatkan bonus satu alat musik bekas namun masih bisa dipakai. Hal tersebut merupakan salah satu berkat dari Tuhan untuk gereja kita. Ada beberapa aset yang dapat dikatakan

mahal untuk hal tersebut penggunaan asetnya biasanya akan ditulis panduan dalam penggunaannya supaya aset lebih terjaga.”

Perawatan aset yang ada digereja sendiri Responden Tiga menuturkan bahwa yang terpenting adalah bagi yang menggunakan alat seperti contohnya pemain musik yang menggunakan alat musik harus bisa *maintenance* setiap alat yang digunakannya. Beliau menuturkan yang terpenting adalah rasa saling memiliki sehingga aset-aset yang terdapat digereja tetap awet dan tidak mudah rusak.

Responden Tiga sendiri yang sudah dipercaya ± 10 tahun dalam perbendaharaan aset sendiri mengatakan perlu dilakukan regenerasi, namun yang terpenting dalam melakukan regenerasi bahkan tidak hanya mengenai penjagaan aset gereja adalah rasa memiliki pada gereja termasuk aset pada gereja. Beliau tidak memiliki kriteria khusus, namun beliau akan memilih sendiri orang yang nantinya akan menggantikannya melalui cara kerja yang dinilai sendiri oleh Responden Tiga. Dan yang terpenting dari semua itu selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Bapak Gembala Sidang dan Bendahara Umum digereja adalah untuk memiliki hati yang mau melayanni Tuhan tanpa harus dibayar karena bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan.

Pengendalian Internal Keuangan Gereja

Semua kegiatan dalam GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa hanya akan melaporkan laporan keuangan mereka pada akhir tahun yang akan dipertanggungjawabkan kepada semua pengurus bidang yang lain, kepada penatua dan kepada Gembala Sidang. Responden Satu sendiri menjelaskan mengapa laporan keuangan hanya diminta pada akhir tahun ketika melakukan evaluasi karena:

“Saya meminta laporan keuangan setiap bidang atau kepada bendahara umum hanya saat akhir tahun saja. Hal tersebut digabungkan dengan saat evaluasi program akhir tahun. Alasan mengapa saya hanya meminta saat akhir tahun adalah karena setiap bidang setiap kepengurusan yang ada sudah memiliki Ketua Bidang masing-masing. Ketika Ketua Bidang ingin mengetahui berapa jumlah kas di bidangnya mereka dapat menanyakan langsung kepada bendaharanya, karena organisasi kita setiap bidangnya Puji Tuhan sudah mandiri. Setiap bidang sudah dibentuk pengurus oleh Ketua Bidangnya.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa pengendalian dari laporan keuangan pada GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa ini relatif longgar. Laporan keuangan tidak diminta oleh Gembala Sidang pada setiap bidangnya setiap bulan dengan alasan sudah adanya kepercayaan. Ketika gembala sidang ingin mengetahui berapa jumlah kas yang terdapat dibidang dapat ditanyakan langsung kepada Ketua Bidang masing-masing. Setiap organisasi memiliki pilihan strategi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Responden Satu selaku Gembala Sidang GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa merasa hal tersebut sudah baik karena organisasi gereja bukan merupakan organisasi yang besar, namun sekalipun tidak besar organisasi ini sudah

tumbuh dengan sehat. Ketika dikaitkan dengan kekeliruan pencatatan maupun kecurangan terkait dengan laporan keuangan, Responden Satu menjelaskan sebagai berikut:

“Semenjak saya menjabat dari tahun 2002 sampai dengan hari ini belum pernah terdengar dan belum pernah mengetahui mengenai kekeliruan apalagi kecurangan yang dilakukan baik Bendahara Umum maupun Bendahara bidang. Hal tersebut dikarenakan semua pengurus sudah dipilih oleh Ketua masing-masing yang sudah mengenal baik. Ketua Bidang dan semua orang saya percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menentukan kepengurusan maupun setiap Kepanitiaan yang ada didalam Gereja seperti contohnya Panitia Natal dan Paskah Umum digereja. Setiap Ketua memilih semua kepengurusannya sendiri dengan bijaksana. Saya percaya ketika semua baik Ketua bidang maupun Ketua Panitia rajin berdoa, rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil dalam meletakkan orang merupakan keputusan yang benar, memilih dan menempatkan orang yang jujur, yang transparan, yang terpenting memiliki hati untuk melayani Tuhan. Karena organisasi Gereja adalah organisasi yang tidak dibayar maka dari itu memiliki hati yang tulus, jujur, dan melayani tanpa pamrih adalah prinsip utama dalam organisasi gereja.”

Perbedaan lainnya mengenai Gereja aliran Karismatik dan aliran Injili menurut penuturan Bapak Gembala adalah terletak pada sistemnya. Gereja Karismatik memiliki aturan yang longgar, sedangkan Gereja Injili memiliki aturan main yang ketat. Namun semua itu tergantung cara pandang masing-masing dalam menyikapinya. Semua aturan, semua strategi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Alangkah lebih indahnnya apabila bersama-sama menambah kelebihan dari setiap sistem pencatatan maupun pengeluaran dan mengurangi kekurangan dari setiap sistem pencatatan tersebut.

Hampir sebagian besar pengendalian yang dilakukan pada proses masuk dan keluarnya kas yang terdapat di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa termasuk ketika dikaitkan dengan aset yang terpenting adalah tentang sumber daya manusianya. Pengendalian internal pada organisasi nirlaba memang mengenai kualitas sumber daya manusianya. Terlebih bagi organisasi keagamaan sendiri hal yang menjadi poin pentingnya yaitu mengenai kepercayaan antara satu sama lain.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Praktik akuntabilitas yang dijalankan berpedoman pada pengajaran dan Tata Gereja GBI. Dalam hal ini pengurus GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa memberikan pertanggungjawaban baik kepada Kristus sebagai Pemilik gereja maupun kepada Jemaat dan Donatur sebagai penyumbang dana, serta pimpinan organisasi Gereja baik di tingkat daerah seperti BPD maupun di tingkat nasional seperti BPH/ Sinode. Pertanggungjawaban keuangan terkait persembahan dan persepuluhan dari Jemaat serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk digunakan sebagai pendukung kegiatan yang dilaksanakan juga telah dilaporkan dengan

baik. Namun dalam hal ini tidak semua laporan dipublikasikan kepada Jemaat dikarenakan adanya alasan yang menyertai. Laporan keuangan bidang setiap tahun dipertanggungjawabkan kepada Gembala Sidang. Pertanggungjawaban terkait keuangan ini dilakukan kepada BPW, BPD dan BPH dalam hal ini dilakukan oleh Pengurus Gereja juga telah dilaksanakan.

Pengelolaan aset yang terdapat di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri sudah baik, segala pemasukan, pengeluaran maupun pengelolaannya sudah tertata dengan rapi sekalipun pengendaliannya masih dikatakan longgar. GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa sendiri sudah menyediakan panduan bagi setiap pemakaian aset yang dikategorikan mahal dan sulit penggunaannya sehingga resiko yang terjadi cenderung kecil.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara satu sama lain. Akuntansi spiritual sebagai dimensi utama yang menyatakan kepercayaan dan cinta kepada Tuhan (Randa, 2011). Kepercayaan ini menjadi wujud akuntabilitas kepada Kristus, Jemaat dan donatur, serta pimpinan organisasi yaitu BPD dan BPH. Sehingga akuntabilitas dan pengendalian internal berjalan beriringan. Pengendalian internal pada GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa cenderung longgar namun hal itu bukan menjadi alasan proses didalamnya berjalan dengan tidak semestinya. Kepercayaan seorang Gembala Sidang dalam menentukan Bendaharawan maupun Ketua Bidang dalam menentukan bendahara bidang sangat penting. Ketika kepercayaan sudah dimiliki, dan hasil dari pekerjaan telah sesuai dengan standar yang berlaku maka dengan pengendalian yang longgar sekalipun tidak akan ada penyimpangan dan penyelewengan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa peneliti menyarankan agar GBI secara luas memberikan suatu SOP terlebih bagi pengaturan keuangan sehingga dalam pembuatan laporan keuangan sudah memiliki standar hal-hal apa saja yang perlu disampaikan supaya terdapat keseragaman dan pengaturan keuangan yang lebih tertata dengan baik sekalipun GBI merupakan salah satu Gereja dengan aliran Karismatik.

Bagi GBI Dr. Cipto 3 Ambarawa berdasarkan wawancara dengan beberapa jemaat sebaiknya dalam mengeluarkan kas yang dibutuhkan oleh Bidang akan lebih baik mengajukan proposal beserta anggaran rincian yang dibutuhkan minimal surat perjanjian atau memo internal sehingga ada kejelasan untuk apa dana diberikan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan meneliti beberapa objek sekaligus sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan untuk mendapatkan bukti dasar keuangan dari setiap transaksi, dan hanya berdasarkan laporan tahunan dan wawancara kepada narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, C., & CHARIRI, A. (2011). *Analisis Perbedaan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Masjid Ditinjau dari Ukuran Masjid dan Tipe Organisasi Islam Pengelola Masjid (Studi Kasus pada Masjid di kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan implikasinya pada kinerja keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *InFestasi*, 7(2), 137-153.
- Cintokowati, C. (2010). Akuntansi Masjid vs Gereja, Organisasi Nirlaba.
- Agusmasnita, D. (2014). *Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Protestan (Studi Fenomenologi pada Gereja GBKP Perumnas Simalingkar Medan)* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Kabuhung, M. (2013). Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada Organisasi nirlaba keagamaan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Kaomaneng, I. S. (2012). Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Gereja. *Sripsi (tidak diterbitkan)*, (online) dalam http://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera57-Zkf1bQR3Gc3J71d2tfuUzIPVC.pdf diakses pada tanggal, 13.
- Kristina, F. M. (2010). Studi atas akuntansi pada organisasi gereja yang dilihat dari sudut pandang pelaporan keuangan.
- Kurniawan, E.K. Akuntabilitas Keuangan Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba." *Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, 2014.
- Nuraini, U. (2011). Akuntabilitas Organisasi Non Pemerintah Yayasan.
- Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. (2011). Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 35-51.
- Silvia, J., & Ansar, M. (2011). Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, 14.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 21-22.
- Tiasari, Hannum. (2013) Hubungan Antara Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 1(2).
- Usamah, U. (2010). Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Master Thesis, Universitas Diponegoro. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/9222/>